



Azirwan

00039 /perpus -  
KPK / 2013

A KSK 49

# Pertemuan Amplop di Lorong Toilet

*Beberapa saksi melihat transaksi Sekda Bintan, Azirwan, dengan Al Amin Nasution di Hotel Ritz Carlton. Menteri Kehutanan M.S. Kaban membantah menerima Rp 1 milyar.*

**M**eski hukum mengenal asas praduga tak bersalah, anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Al Amin Nur Nasution, harus menerima dua "vonis" sekaligus sebelum perkaranya rampung disidangkan. Tak lama setelah rekaman percakapan teleponnya diputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, istrinya, penyanyi dangdut Kristina, mengajukan gugatan cerai.

Sedangkan partai yang menaunginya, PPP, memberi dua opsi yang ujung-ujungnya berakibat sama, yakni mengundurkan diri atau dipecat dari

partai. Padahal, sidang perkaranya masih mendengarkan keterangan para saksi. Rencananya, Senin pekan depan, Jaksa Penuntut Umum Suwarji memanggil tiga kolega terdakwa kasus korupsi alih fungsi hutan lindung itu di Komisi IV DPR.

Mereka adalah Azwar Chesputra dan Syarfi Hutauruk (Fraksi Partai Golkar) serta Sujud Sirajuddin (Fraksi Partai Amanat Nasional). Selain ketiga anggota DPR itu, saksi lain yang akan dipanggil adalah Zadi Zainal Hasan. Saksi terakhir ini adalah pengacara calon rekanan yang akan menggarap pembangunan Bandar Sri Bintan, yang mengalihfungsikan lahan hutan lindung di Bintan.

Nama tiga anggota DPR itu disebut-

sebut oleh saksi Edi Pribadi dan Morano P. di persidangan, Senin siang lalu. Edi dan Morano adalah staf khusus Pemerintah Kabupaten Bintan, yang dalam perkara ini, antara lain, bertugas mengirim uang dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Azirwan, kepada Al Amin.

Dalam persidangan Senin pekan lalu, nama tiga anggota DPR itu juga disebut oleh Sagita Haryadi. Sagita adalah saksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas menyelidiki, termasuk menyadap pembicaraan telepon Azirwan.

Ketiga anggota DPR itu, kata Sagita, sempat terlibat pembicaraan dengan Azirwan. Selain mereka, Sagita juga menyebut nama Hilman Indra dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

Malah Sagita mengungkapkan, keempat anggota DPR itulah yang lebih dulu sering berkomunikasi dengan Azirwan. Bahkan mereka sempat bertemu langsung dengan Azirwan.

Salah satu komunikasi antara Azirwan dan beberapa anggota DPR itu terjadi pada 20 Juni 2007. Belakangan, barulah Al Amin yang aktif berhubungan dengan Azirwan. "Ada kesulitan Hilman Indra menghubungi Azirwan, akhirnya Al Amin yang menanganinya," ujar Sagita.

Sekalipun begitu, Sagita mencatat komunikasi penting antara Azirwan dan beberapa anggota DPR itu, 20 Juni tahun



Malam  
Sambat  
Kaban

## Kaban dalam Telepon Azirwan

**M**enteri Kehutanan (Menhut) Malam Sambat Kaban langsung menggelar konferensi pers di rumah dinasnya, sehari setelah namanya disebut-sebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa malam pekan lalu. Soalnya, dalam sidang yang digelar sehari sebelumnya, muncul dugaan bahwa ia turut menikmati uang Rp 1 miliar untuk meloloskan izin alih fungsi hutan lindung menjadi ibu kota Kabupaten Bintan.

Sangkaan itu mencuat ketika anggota majelis hakim tindak pidana korupsi, Andi Bachtiar, membacakan transkrip percakapan telepon antara Azirwan dan laki-laki anonim yang dijuluki "Male". Hubungan telepon yang disadap penyidik KPK, Sagita Haryadi, itu berlangsung pukul 11.49 WIB, 30 Januari lalu.

"Menhut sudah selesai, tinggal di DPR. Nanti suratnya masuk tanggal 16. DPR minta tambah lagi tuh, angkanya Rp 3 miliar plus-plus jadinya," kata Azirwan.

Lelaki anonim itu menjawab, "Jangan mau dong, yang buat kita bagaimana dong, Bang. Yang buat kita kurang jadinya, kan."

"Iya, saya sudah bilang ke bupati. Kata bupati, duitnya sudah *nggak* ada lagi. Bupati pesan, yang di DPR kurangi dululah, nanti dicari lagi."

Dari rekaman percakapan telepon Azirwan sebelumnya terungkap adanya investor yang akan membantu mengalirkan duit Rp 4 miliar untuk memuluskan alih fungsi hutan lindung itu. Hubungan telepon yang berlangsung pukul 13.15 WIB, 14 November tahun lalu, itu dilakukan dengan seorang pria berinisial ANA.

"Eh, itu kemarin investor tuh sudah setuju bantu maksimal Rp 4 miliar. Rp 4 miliar ini akan diserahkan sebelum kita menandatangani *joint agreement* itu," kata Azirwan.

Uang Rp 4 miliar itu, menurut Azirwan dalam transkrip rekaman telepon itu, harus dihemat. "Tapi jangan kasihtahu Pak Bobi uangnya Rp 4 miliar itu," ujarnya. "Saya akan usahakan Rp 2 miliar di DPR-RI dan Rp 1 miliar di menteri," kata Azirwan lagi.

Majelis hakim lantas menanyakan identitas Bobi. Dijawabnya bahwa Bobi adalah calon investor untuk alih fungsi hutan di Kabupaten Bintan. Sedangkan soal uang yang diminta Rp 3 miliar plus-plus itu maksudnya adalah Rp 3,6 miliar.

Nama M.S. Kaban disebut lagi dalam pembicaraan antara Azirwan dan lelaki anonim tadi. "Mungkin mereka mau buat saya jumpa dengan Pak Kaban sekali," kata Azirwan.

Menteri Kaban tentu saja membantah telah menerima uang Rp 1 miliar, sebagaimana disebut-sebut dalam persidangan. Bahkan ia menyatakan, penyebutan namanya dalam sidang itu adalah upaya pembunuhan karakter dan fitnah. "Kalau disebut-sebut dalam pembicaraan telepon, siapa saja bisa disebut-sebut," ujarnya.

Namun ia memastikan, "Saya tak melakukan komunikasi dengan Azirwan." Ia justru mempertanyakan, apakah transaksi uang yang disebut-sebut diberikan kepadanya itu sudah dilakukan atau masih berupa rencana. "Kalau sudah, kepada siapa diberikan? Kapan?" katanya.

Lagi pula, menurut dia, kasus ini masih dalam proses persidangan. "Siapa saja telepon, sebut nama siapa saja juga bisa, kan?" tutur Kaban. Karena itu, sebagai warga negara, ia siap diperiksa KPK. Ia juga terbuka jika PPAK mau memeriksa rekeningnya. ■